LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN AGUSTUS DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 9 September 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pejabat Verifikasi / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

D. Notulis

Pelaksana Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 61,68 %

b.Keuangan = 11.760.227.466 (57,08%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Umum							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.710.000			6.200.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.710.000	58,02	43,57	6.200.000	(14,45)	Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual (adanya PPKM), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			2.120.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	54,68	27,72	2.120.000	(26,96)	dikarenakan meningkatnya kasus Covid19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan

							PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	15.750.000			7.875.000		
1	Pertemuan Rutin Pengurus dan Pelaksanaan Program Kerja FAN Jateng	15.750.000	66,67	50,00	7.875.000	(16,67)	Tidak diambil di bulan Agustus karena masih PPKM
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	56.110.000			47.654.000		
1	Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	35.160.000	100	86,12	29.074.000	(13,88)	karena PPKM
2	Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	20.950.000	100	88,68	18.580.000	(11,32)	karena PPKM
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	45.262.000			1.000.000		
1	Penyusunan GDPK	45.262.000	80,89	73,53	1.000.000	(7,36)	masih menunggu kesiapan dari pihak ke tiga
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	67.767.000			11.663.500		
1	Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB	35.744.000	100	95	5.992.000	(5)	karena ada penambahan volume kegiatan di perubahan
2	Orientasi Kader Kelompok BKR	32.023.000	100	95	5.671.500	(5)	karena ada penambahan volume kegiatan di perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			814.104.000		
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	58,90	35,73	814.104.000	(23,17)	Kegiatan Pelayanan KB MKJP masih terkendala PPKM akibat pandemi Covid-19 sehingga pelayanan di daerah dibatasi, terutama metode KB MKJP MOW yang memerlukan proses pembedahan di rumah sakit
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	176.321.000			70.435.000		
1	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB TMKK	47.000.000	1,10	0	0	(1,10)	adanya peraturan ppkm
2	Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja	46.291.000	100	96,38	32.185.000	(3,62)	adanya peraturan pemerintah tentang ppkm
3	Pengembangan Model KIE tentang KB-KS	83.030.000	100	93,00	38.250.000	(7,00)	adanya peraturan pemerintah tentang ppkm

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	4.800.000			0		
1	Rakor data kekerasan	4.800.000	100	0	0	(100)	Belum bisa dilaksanakan karena masih kondisi PPKM yang belum boleh mengadakan kegiatan secara luring.

	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	13	0	0			

	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Agustus terdapat 14 kegiatan yang berdeviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Makanan dan Minuman Tamu dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual (adanya PPKM), sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
2. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan Meningkatnya kasus Covid 19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Pakan Ikan dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, dikarenakan ikan arwana (dalam aquarium) mati, maka pagu anggaran sisa akan diajukan pada perubahan APBD.
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Peningkatan Wawasan Terkait PUG dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara luring.
5. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan potensial dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan adanya kebijakan PPKM di daerah.
6. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelatihan PPEP dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga beberapa daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb.
7. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Layanan PUSPAGA dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring.
8. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu pertemuan rutin pengurus dan pelaksanaan program kerja FAN jateng dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara luring.
9. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM darurat, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara luring.
10. Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyusunan GDPK dikarenakan masih menunggu kesiapan dari pihak ketiga atau proses kontrak.
11. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ada 3 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB, Orientasi kader kelompok BKR, Harganas Tingkat Pusat dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang

PPKM darurat, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tsb dan Rekrutmen tenaga teknis tidak dilaksanakan, pagu anggaran akan di rasionalisasi pada saat perubahan APBD.

12. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelayanan KB MKJP dikarenakan Kegiatan di lapangan kurang maksimal karena kondisi pandemi, dampak dari kebijakan PPKM darurat sehingga banyak daerah yang tidak ada pelayanan KB MKJP, terutama KB MKJP MOW yang memerlukan proses pembedahan di Rumah Sakit.
13. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja ada 3 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penggerakan dan bakti sosial pelayanan KB TMKK, Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja, dan Pengembangan model KIE tentang KB-KS dikarenakan Pelaksanaan kegiatan ini terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD dan Pengembangan Model KIE tentang KB-KS dikarenakan kegiatan monitoring model kie tentang KB KS belum dapat dilaksanakan secara luring karena adanya PPKM darurat.
14. Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Rakor Data Kekerasan hal ini disebabkan Rakor semula direncanakan dengan format pertemuan secara tatap muka, namun karena kondisi pandemi meningkat dan ada SE Sekda agar tidak mengadakan pertemuan secara tatap muka dan ketika akan dilakukan secara daring, narasumber tidak bisa karena harus menjalankan isolasi terpusat (rakor ini dimaksudkan untuk pelatihan teknis aplikasi ekekerasanjateng yang sudah terintegrasi dengan Simfoni PPA, sehingga akan lebih efektif kalau dilakukan secara tatap muka.)

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan 14 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu pada bulan September diupayakan untuk pelaksanaan 14 kegiatan tersebut atau melalui daring namun untuk 3 SSK antara lain Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Pakan Ikan, dan Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja, selain itu ada juga beberapa SSK lain yang terkena refocusing dan dianggarkan pada kegiatan setelah perubahan APBD.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan September sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaPenguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kualitas PendudukPembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan darah Provinsi
3. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.
3. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabid/Kasi/Kasubbag agar selalu mengontrol dan mencermati realisasi fisik dan keuangan serta reasoningnya pada aplikasi e-controlling setiap akhir bulan.
2. Masing-masing bidang agar mematuhi pelaksanaan kegiatan sesuai awal perencanaan yang ada di e-rko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya deviasi.
3. Pengesahan APBD Perubahan tahun 2021, bulan oktober sehingga kegiatan yang dilakukan setelah perubahan, mohon dapat disesuaikan waktunya.
4. Percepatan penyerapan anggaran agar dilakukan dengan segera dan tidak menumpuk dibulan desember.
5. Kabid/Kasi/Kasubbag agar mencermati kembali indikator capaian di RPJMD, renstra, renja dan progressnya.
6. Penganggaran penanganan anak yatim/piatu/yatim piatu dalam APBD

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis 9 September 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001